



OPTIMALISASI KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS NASIONAL DALAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK TERWUJUDNYA INDONESIA TANGGUH

Muhammad Kristian Widianoro¹⁾, Etwan Ramadhan²⁾, Roni Saputra³⁾

^{1,2,3)}Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut

Abstrak

Kepemimpinan demokratis merupakan salah satu indikator penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca pandemic Covid-19. Gaya pemimpin yang demokratis mampu mengoptimalkan kebijakan penanganan Covid-19 agar lebih cepat dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan demokratis sebagai sumbangsih pemikiran untuk pemimpin nasional dalam rangka untuk akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Metode kualitatif dipilih pada penelitian ini dengan mengumpulkan data melalui literatur komprehensif dan Forum Group Discussion. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini kepemimpinan demokratis belum berjalan secara optimal karena masih terjadi seperti program antar Lembaga yang kontraproduktif, desentralisasi kebijakan yang kurang tepat, hingga pengawasan tidak efisien sehingga akan timbul celah koruptif. Sehingga optimalisasi kepemimpinan demokratis yang perlu dicapai adalah dengan gaya kepemimpinan partisipatif yang juga mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat, integrasi antar Lembaga, dan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab sesuai bidang.

Kata Kunci: Covid-19, Kepemimpinan Demokratis, Pemulihan Ekonomi

*Correspondence Address : m.kristian.w@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v9i1.2022.208-212

© 2021UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan pengaruh negatif terhadap kondisi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam berbagai bidang, termasuk perekonomian nasional. Menurut Hanafi et al (2020), Secara intuitif kajian mendalam dan proyeksi tentang pemulihan ekonomi pasca Covid 19 akan mendominasi diskursus selama beberapa tahun ke depan. Resesi yang sudah terjadi dan depresi yang sangat mungkin terjadi juga membuat para pakar ekonomi berpikir untuk mencari jalan keluar yang tepat untuk memulihkan keadaan.

Berdasarkan Hanafi et. al (2020), berbeda dengan negara lain, Indonesia lebih fokus pada mitigasi pemulihan ekonomi sebagai orientasi utamanya. Hal ini sejalan dikatakan bahwa Indonesia berpotensi kehilangan Rp 127 triliun seiring dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang semakin tertekan (Ronald, 2020). Tantangan ini perlu mendapat respon kebijakan yang tepat untuk mitigasi resiko secara masif. Menurut (Aunillah 2020) kebijakan yang efektif hanya mampu dilahirkan oleh pemimpin yang mampu dalam mengelola Krisis dengan baik.

Salah satu upaya dalam melahirkan kebijakan yang efektif adalah dengan optimalisasi kepemimpinan demokratis nasional dalam percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional guna terwujudnya Indonesia tangguh maka perlu dilakukan pemecahan masalah melalui penetapan kebijakan, perumusan strategi yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan upaya-upaya terkait dengan tetap memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan tersebut. Dalam pemecahan masalah ini menggunakan analisis studi kepustakaan dari teori-teori terkait.

Pemimpin demokratis memiliki Kebijaksanaan dalam pendelegasian wewenang sehingga wewenang akan

diberikan disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab dari lembaga atau kelompok sesuai perundang undangan. Perubahan yang terjadi secara ekonomi, sosial, dan politik dapat dikelola dengan baik. Pemimpin yang bijaksana akan mendelegasikan kewenangan untuk mempercepat penanganan terhadap kelompok masyarakat yang paling menderita, warga yang paling terdampak, ketimbang memikirkan kelompok-kelompok yang lainnya.

METODE PENELITIAN

Tujuan penulisan ini adalah sebagai bahan masukan dan pemikiran bagi pimpinan nasional tentang optimalisasi kepemimpinan demokratis dalam pemulihan ekonomi Nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka terwujudnya Indonesia tangguh.

Penulisan ini menggunakan metode kualitatif melalui berbagai literatur komprehensif. Setelah itu, dilakukan pendekatan deduksi untuk merumuskan dan analisis dalam menjawab rumusan masalah secara obyektif menggunakan studi kepustakaan berdasarkan literatur dan referensi yang tersedia serta didukung pendekatan empiris. Selain itu, metode pengumpulan data juga dilakukan melalui Forum Group Discussion dalam rangka penarikan suatu pemahaman obyektif dalam sebuah kelompok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19 telah menjadi ancaman nyata yang mampu mengancam perekonomian dan mengalami kontraksi pada tahun 2020. Kondisi ini menjadi persoalan serius yang secara simultan ditangani oleh pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional secara cepat dan tepat. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai respon aktif terhadap permasalahan ini melalui berbagai bantuan dan subsidi pada beberapa sektor produktif. Pada

kajian penelitian ini, pendekatan yang dilakukan untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional adalah dengan sudut pandang kepemimpinan demokratis dalam rangka optimalisasi kebijakan yang telah dibuat.

Permasalahan yang dialami bangsa Indonesia harapannya bisa segera diatasi dengan adanya sosok pemimpin demokratis yang berani mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Oleh karena itu, dibutuhkan sosok pemimpin untuk bisa mewujudkan tujuan nasional yang berlandaskan paradigma nasional dimana Pancasila sebagai landasan idiil, undang-undang dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

Berdasarkan hasil hasil *Focus Group Discussion*, beberapa contoh konkret permasalahan terkait kepemimpinan demokratis yang dapat menghambat pemulihan ekonomi nasional dalam upaya pencegahan Covid-19 saat ini adalah diantaranya :

- 1). Kementrian/ lembaga terkait memiliki program masing-masing sehingga kebijakan yang dibuat kurang efektif dan membuat kalangan masyarakat bingung dalam mengikuti aturan pencegahan covid-19.
- 2). Pengawasan yang tidak tidak efisien sehingga menimbulkan celah koruptif dalam berbagai lini.
- 3). Urusan kesehatan yang didesentralisasikan kepada pemerintah daerah telah menyebabkan masing-masing daerah menyusun kebijakan sepihak dalam menghadapi penyebaran Covid-19 dalam hal ini pemerintah pusat belum melaksanakan regulasi sesuai perundang undangan.

Berdasarkan realitas permasalahan tersebut, mencerminkan bahwa masih rendahnya kepemimpinan demokratis dalam menunjang sinergisitas percepatan penanggulangan Covid-19. Kepemimpinan demokratis menjadi sangat penting karena dengan optimalnya kerjasama antar instansi akan mampu mempercepat penghentian laju sebaran Covid-19 sehingga pemerintah dapat melakukan akselerasi dalam pemulihan ekonomi lebih cepat. pemimpin demokratis akan memikirkan langkah untuk memulihkan perekonomian dengan tujuan kesejahteraan sosial dengan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya agar tercipta Indonesia sebagai negara tangguh. Langkah ekonomi berupa bantuan usaha dan subsidi diberikan dalam mempermudah masyarakat mencapai kesejahteraan sosial untuk meningkatkan ekonomi nasional dalam rangka terwujudnya Indonesia tangguh.

Sebagai salah satu solusi, figur kepemimpinan demokratis nasional dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Keberanian dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat.

Menurut Freddy Numberi dalam bukunya "Kepemimpinan sepanjang zaman" ada empat type dan gaya kepemimpinan salah satunya gaya kepemimpinan demokratis yang biasa juga di sebut tipe "partisipatif" karena melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan, yang intinya pemimpin tersebut merasa menjadi bagian dari sistem dan ikut pula dalam proses pengambilan keputusan

2. Integrasi antar lembaga/kelompok.

Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada Warga Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, Masyarakat menjadi subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Sudarwan Danim mengemukakan kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang dilandasi oleh anggapan bahwa hanya karena interaksi kelompok yang dinamis. Pemimpin demokratis dapat mengintegrasikan antar lembaga atau kelompok sehingga mampu menyatukan semua data baik tentang pandemi sehingga mudah dilaksanakan penanganan dan mempersiapkan segala fasilitas yang dibutuhkan. Pemimpin demokratis mempunyai berkarakter jujur, amanah serta mempunyai kecerdasan dan kemampuan komunikasi yang dapat menyampaikan program – program kebijakan pemerintah dengan lebih mudah diterima dan diikuti. Kebijakan dalam menghadapi pandemi dijelaskan secara rasional, *evidence-based* (praktek yang berdasarkan bukti) yang dijustifikasi dengan kaidah ilmu pengetahuan, serta diinformasikan secara transparan. pemimpin demokratis beralasan rasional di balik keputusan yang diambil. Integrasi antar lembaga atau kelompok akan mempercepat penanganan pandemi Covid-19 karena memiliki kesamaan data yang dijadikan dasar dalam proses penanganan. Sinergitas sistem dapat menutup celah koruptif dan mengefektifkan program dan kebijakan yang dibuat.

3. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab sesuai bidang.

Pada pendekatan kepemimpinan demokratis, wewenang didelegasikan sesuai dengan perran dan tanggung jawab dalam komponen pemerintahan. Secara detail, Pembagian Urusan Pemerintahan Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah Pasal 9 ayat (1) menyatakan urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Selain itu dalam optimalisasi pelayanan, sinergisitas menjadi factor penting dalam kebijakan (Damanik 2020)

Indikator keberhasilan

Ada beberapa indicator keberhasilan yang dapat digunakan sebagai panduan dan parameter dalam keberhasilan kepemimpinan demokratis nasional dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca Covid-19 guna terwujudnya Indonesia tangguh.

a) Indikator keberhasilan kepemimpinan demokratis adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan yang cepat dan tepat

2. Lembaga/kelompok dapat terintegrasi dalam sistem penanganan covid-19
 3. Wewenang diberikan sesuai dengan fungsi dan tugas dari lembaga terkait.
- b) Indikator keberhasilan percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional adalah sebagai berikut:
1. Pandemi Covid-19 dapat ditekan bahkan dihilangkan secepat mungkin.
 2. Ekonomi masyarakat meningkat, pengangguran berkurang dan diikuti dengan Pertumbuhan ekonomi nasional.
- c) Indikator keberhasilan terwujudnya Indonesia tangguh adalah sebagai berikut:
1. Mampu keluar dari krisis pandemi.
 2. Kesejahteraan masyarakat meningkat.

KESIMPULAN

Optimalisasi kepemimpinan demokratis merupakan salah satu opsi penting yang dapat dilakukan dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi nasional secara tidak langsung. Kepemimpinan demokratis dibutuhkan dalam rangka untuk memperkuat sinergisitas antar lembaga dan efektivitas kebijakan pencegahan penyebaran Covid-19 yang telah dibuat oleh pemerintah. Sehingga, upaya pemulihan ekonomi nasional dapat dilakukan secara lebih cepat. Adapun beberapa optimalisasi kepemimpinan demokratis berdasarkan penelitian kualitatif ini dalam memecahkan permasalahan terkait kepemimpinan demokratis adalah

kolaborasi antar semua lembaga dalam upaya mendukung optimalnya kebijakan pencegahan Covid-19, pengambilan keputusan yang partisipatif, dan optimalisasi kepemimpinan demokratis dalam menghadapi permasalahan terkait kepemimpinan demokratis yang tidak bisa melaksanakan pendelegasian wewenang dirumuskan melalui edukasi undang undang no 32 tahun 2004 dalam percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka terwujudnya Indonesia tangguh.

DAFTAR PUSTAKA

- Aunillah F. 2020. Proyeksi Kepemimpinan Menghadapi pandemic Covid-19. Policy Brief UGM
- Damanik S. 2020. Merajut ekonomi Kita Pasca Covid-19. MDIK UGM
- Hanafi, et al. 2020. Kepemimpinan Lokal di Masa Pandemi Covid-19: Respons, Kebijakan, dan Panggung Elektoral. Jurnal penelitian politi Vol 17. No. 2
- Ronal. 2020. Dampak Virus Corona, Kerugian Ekonomi Indonesia Bisa Mencapai 127 Triliun. Diakses pada 07 Juni 2021 dari Pasar Dana: <https://pasardana.id/news/2020/3/9/dampak-virus-corona-kerugian-ekonomi-indonesiabisa-mencapai-127-triliun/>
- Sudarwan Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah, Hlm. 213
- Yosua, Praditya..Prospek Ketahanan Nasional Dalam Era Reformasi dan Otonomi Daerah. Jurnal Ketahanan Nasional,Vi (1), April 2001. Hal.18.
- Wardhana, D. 2020. Kajian Kebijakan dan Arah Riset Pasca Covid-19. The Indonesian Journal of Development Planning Volume IV No. 2 - Juni 2020